

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN DI KOREA UTARA SETELAH DITERAPKANNYA IDEOLOGI *JUCHE* PADA MASA KIM JONG-IL

Sosok seorang pemimpin Korea Utara yang dianggap penting bagi Masyarakat Korea Utara. Dalam sejarah perkembangan Korea Utara, pemimpin Korea Utara cukup representatif untuk menunjukkan bahwa negara Korea Utara adalah negara yang kuat dalam menangani berbagai kecaman pihak asing. Sosok Kim Jong-Il merupakan pemimpin yang dikenal sebagai pemimpin revolusioner Korea Utara. Posisi dan perannya dalam partai serta pemerintahan terlihat semakin kuat.

4.1. Kepemimpinan Kim Jong-Il

Kim Jong-Il menganut paham yang sama dengan ayahnya yakni Kim Il-Sung. Kim Jong-Il terlahir dari keluarga berjiwa patriot. Kim Il Sung, ayahnya, adalah seorang pejuang kemerdekaan Korea Utara yang telah dijajah oleh Jepang. Kim Jong-Il lahir pada tanggal 16 Februari 1941.¹

Sejak muda Kim Jong-Il adalah sosok yang sangat aktif dalam dunia politik, hal ini mendukungnya dalam berkarier yang lebih cemerlang di masa depan. Beberapa kegiatan politik yang dilakukan oleh Kim Jong-Il diantaranya adalah² :

¹ Andi Rafael Saputra, *Op. Cit.*, h. 11

² *Ibid.*, h. 26

Tabel 4.1: Sejarah Politik Kim Jong-Il

Juni 1964 – September 1973	Ketua Komite Sentral (WPK)
Oktober 1972	Anggota Komite Pusat WPK
September 1973	Sekretaris Komite Pusat WPK
Februari 1974	Komite Politik Sentral Partai
Oktober 1980	Komite Pusat Biro Politik, Sekretaris Komite Sentral, Komite Militer Pusat dalam Kongres Partai Buruh
Mei 1990	Wakil Ketua Pertama Komisi Pertahanan Nasional dalam Majelis DPRK
Desember 1991	Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea
20 April 1992	Marsekal DPRK
April 1993	Ketua Komisi Pertahanan Nasional dalam Majelis pertemuan DPRK

Kim Jong-Il bergabung dengan Partai Buruh pada Juli 1961. Kim Jong-Il diangkat ke Komite Sentral Partai Buruh untuk memimpin serangan terhadap revisionis dan memastikan partai tidak menyimpang dari garis ideologi yang ditetapkan oleh Kim Il-Sung. Kim Jong-Il juga memimpin upaya mengekspos pembangkang dan kebijakan menyimpang untuk menjamin penegakan hukum secara tegas dengan sistem ideologi partai.

Pada awal tahun 1970 Kim Il Sung mulai mempersiapkan Kim Jong-Il untuk menjadi pemimpin di Korea Utara. Pada tahun 1971- 1980, Kim Jong-Il diangkat ke posisi yang sangat penting dalam partai. Pada tahun 1980, Kim Jong-Il melakukan persiapan untuk menggantikan Kim Il Sung sebagai pemimpin Korea Utara.

Pemerintahan yang akan dibuat Kim Jong-Il, sama dengan masa pemerintahan sebelumnya, yakni masa pemerintahan Kim Il Sung.

Sama halnya dengan Kim Il-Sung yang dikenal sebagai “pemimpin besar”, Kim Jong-Il pun disanjung oleh media di Korea Utara sebagai “pemimpin yang tak kenal takut” dan “penerus besar revolusioner”. Kim Jong-Il berhasil memprakarsai serangkaian inspeksi *drop-in* bisnis, pabrik dan kantor pemerintahan. Pada kongres partai ke-6 tahun 1980, Kim Jong-Il diberi posisi senior di Komite Kebijakan Partai Buruh, Komisi Militer dan Sekretariat (departemen eksekutif yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan).³

Kim Jong-Il mengambil alih kepemimpinan Korea Utara pada tahun 1994. Kim Jong-il melanjutkan gaya kepemimpinan ayahnya dengan mengutamakan kekuatan militer negara diatas segala-galanya, meletakkan prinsip kemandirian tak bergantung pada negara lain, keras dan tidak segan-segan bersikap represif. Proses pergantian kepemimpinan dari Kim Il Sung ke Kim Jong-Il tidaklah mudah. Terdapat gesekan di tubuh parlemen Korea Utara.

Kondisi yang rumit bagi Kim Jong-Il dapat membawa kekacauan politik, mengancam rezim di Korea Utara. Kim Jong-Il mengatasi masalah ini dengan sangat rinci dan rumit, yaitu melestarikan kekuatan melalui pengaruh kepemimpinan Kim Il-Sung yang penuh karisma dan memanfaatkan budaya budi pekerti. Kim Jong-Il memimpin Korea Utara dengan tiga slogan, yaitu “memimpin dengan budi, merangkul

³ Ibid, h.29

semua dan mengutamakan militer” artinya, Kim Jong-Il akan memimpin semua kalangan, meningkatkan keamanan dan membangun ekonomi nasional dengan memanfaatkan militer untuk kesejahteraan rakyat.

Berbeda dengan Kim Il Sung yang mana menerapkan *Juche* di sektor Industri untuk meningkatkan ekonomi Korea Utara, lain halnya dengan Kim Jong-Il yang menerapkan *Juche* di bidang militernya. Ideologi *juche* diaplikasikan oleh Kim Jong-Il untuk mempengaruhi pencapaian visinya, dan mampu mempengaruhi budaya organisasi dikalangan institusi dan militernya, karena bagi Kim Jong-Il militer adalah strategi paling efisien untuk Korea Utara. Prinsip meningkatkan militer merupakan langkah nasional bagi Kim Jong-Il untuk memelihara rezim kekuasaannya, sekaligus membangun ekonomi nasional. Menunjukkan militer di Korea Utara merupakan aset yang paling kuat dan yang dapat di mobilisasi dengan efektif.⁴ Loyalitas dan kepatuhan serta kecintaan kepada Kim Jong-Il oleh masyarakat menjadi sebuah pertanda bahwa mereka telah berhasil memberikan pengaruh yang besar sehingga dapat mengarahkan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya. Pengaruh yang diberikan adalah kepercayaan akan persatuan dan kesatuan rakyat untuk kelangsungan hidup Korea Utara melalui kepemimpinannya.

Kebijakan politik yang diambil oleh Kim Jong-Il memberikan kontribusi dan pengaruh yang besar terhadap pembentukan budaya strategis sehingga masyarakat Korea Utara memiliki sifat kecenderungan lebih militan dibanding dengan negara lain

⁴ Achmad Munif, *50 tokoh politi legendaris dunia*, (Yogyakarta: Narasi, 2007), h. 93

yang memiliki sifat terbuka. Dengan sifat masyarakat Korea Utara yang seperti ini dapat mempertahankan rezim kekuasaan para pemimpin Korea Utara.

4.2. Kondisi Perekonomian Korea Utara Masa Kim Jong-II

Setelah meninggalnya Kim Il Sung, Korea Utara mengalami krisis yang luar biasa. Krisis ekonomi yang bermula sejak tahun 1995-2000 merupakan periode sejarah perjuangan luar biasa bagi Kim Jong-II untuk membangun kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Hal ini berkaitan pula dengan runtuhnya Uni Soviet dan negara komunis di Eropa Timur yang membuat Korea Utara terisolasi dalam segi politik dan ekonomi. Penyebab krisis ini sebenarnya berkaitan dengan ketidakpastian politik pada era Kim Il Sung. Kejayaan yang telah diperoleh Korea Utara belum juga mampu mengatasi masalah paling serius yang ada di Korea Utara, yakni kelaparan.

Pada masa kepemimpinan Kim Jong-II, Korea Utara menjadi negara yang berusaha hidup tanpa bantuan negara lain dengan kata lain bahwa Kim Jong-II menekankan bahwa Korea Utara harus bergerak dengan prinsip mandiri sesuai dengan ideologi *Juche* yang dianut Korea Utara. Politik yang telah dibangun tersebut, membuat kehidupan masyarakat Korea Utara pada umumnya harus menerima kenyataan hidup dengan pertumbuhan ekonomi negara yang rendah. Keadaan ekonomi negara tersebut membuat rakyat Korea Utara hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, kondisi tersebut semakin diperparah dengan kondisi sempitnya lahan pertanian serta lapangan pekerjaan yang terbatas. Namun, dengan kondisi seperti ini masyarakat Korea Utara tetap yakin bahwa pemimpin mereka adalah pemimpin terbaik yang mampu menyatukan Korea

Utara dan membuat masyarakat Korea Utara sangat menghormati dan menyembah pemimpin negaranya.⁵

Bagi Korea Utara sebuah negara harus memiliki kekuatan yang dapat memperkokoh kualitas negaranya. Agar dapat membuktikan persepsi tersebut, maka Korea Utara fokus dalam peningkatan kekuatan militer. Hal ini dibutuhkan untuk pertahanan negara, dimana pertahanan militer ini dipersiapkan untuk mempertahankan Korea Utara jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ideologi *Juche* menuntut Korea Utara untuk tidak bergantung kepada negara lain, tidak seperti Korea Selatan yang bergantung kepada AS. Korea Utara mempercayai bahwa dengan memiliki kekuatan militer yang kuat maka Korea Utara dapat maju dan tidak akan mudah diintervensi oleh negara lain. Alasan inilah yang membuat Korea Utara terus menerus mengembangkan program nuklirnya walaupun program ini terus menerus mendapat berbagai kecaman dari berbagai pihak.⁶

Juche menjelaskan tentang prinsip pertahanan dan pencapaian kebebasan rakyat dan negara, prinsip penguatan mengendalikan kekuatan revolusi dan meningkatkan perannya, serta prinsip memahami pikiran rakyat sebagai faktor utama dalam revolusi dan pembangunan. Hal tersebut, membuat Korea Utara menyadari bahwa untuk menjadi bangsa dan negara yang maju dan kuat, maka diperlukan kekuatan serta semangat untuk mencapai dan mempertahankan tujuan tersebut. Terutama

⁵ Jae-Cheon Lim, *Op. Cit.*, hlm. 52

⁶ Muhammad Nabil, "DIPLOMASI MULTILATERAL SIX PARTY TALKS DALAM PROSES DENUKLIRISASI KOREA UTARA PERIODE 2003-2009", kearsipan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, h. 78.

bertahan dari serangan luar yang mungkin menghambat revolusi dan pembangunan di Korea Utara.⁷

Kim Jong-Il dalam memimpin Korea Utara menempatkan diri menjadi seorang pemimpin yang terhormat. Memimpin Korea Utara dengan gaya otoriter dan diktatornya, serta mengedepankan kekuatan militer negara di atas segala-galanya, membangun persenjataan secara besar-besaran seperti halnya nuklir, maupun dengan tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan represif bagi lawan-lawan politiknya dan rakyatnya yang menentang kebijakan politik pemerintah.

Kebijakan pemerintah Korea Utara harus dibayar mahal dengan kondisi kesejahteraan rakyatnya yang harus hidup di bawah garis kemiskinan akibat embargo dunia internasional sebagai konsekuensi dari program nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara. Kemiskinan yang ada di Korea Utara berdampak pada kurangnya gizi masyarakat yang menyebabkan meningkatnya angka kelaparan dan juga banyak ditemukan kasus penyakit katarak yang dapat menyebabkan kebutaan. Angka kebutaan di Korea Utara sangat tinggi hingga mencapai angka ribuan, hal tersebut didorong rendah dan kurangnya fasilitas medis yang mendasar sehingga tidak dapat mengatasi kasus kebutaan secara maksimal.

Korea Utara merupakan negara yang sangat bergantung pada pertanian, apabila bahan yang dibutuhkan untuk bertani berkurang atau menipis dan pemerintah tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut maka akan terjadi suatu kondisi yang buruk. Akibat minimnya kebutuhan bertani mengakibatkan rakyat Korea Utara kekurangan

⁷ Ibid

bahan pangan, sehingga masih banyak ditemukan masyarakat Korea Utara yang meninggal karena kelaparan. Banyak pula ditemukannya anak-anak di Korea Utara yang mengemis demi bertahan hidup, bahkan banyak masyarakat Korea Utara yang rela untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kurang lebih 3 juta masyarakat Korea Utara yang meninggal akibat kelaparan.⁸ Masalah inilah yang membuat Kim Jong-Il berusaha keras agar Korea Utara dapat terlepas dari kesulitan yang melanda.

Demi mengatasi masalah tersebut Kim Jong-Il membuat kebijakan ekonomi dan militer. Kim Jong-Il berusaha keras membuktikan kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat dan meneruskan membentuk ekonomi secara sistematis atau membangun perekonomian yang kemudian berusaha untuk maju secara mandiri. Masalah perekonomian yang buruk, menimbulkan kelaparan dimana-mana sehingga Kim Jong-Il berusaha membuat pengadaan kebutuhan secara mandiri. Kim Jong-Il membuat struktur konstitusional baru yaitu menyediakan angkatan-angkatan bersenjata untuk melindungi dirinya dan menempatkan suatu pertemuan para pengusaha untuk tujuan politik. Dapat dikatakan Korea Utara sudah mempunyai kekuatan militer yang cukup yang siap untuk bertempur.⁹

Terfokusnya Korea Utara dalam mengembangkan kekuatan militer terutama dalam mengembangkan nuklir dengan tujuan agar kondisi Korea Utara dapat segera

⁸ Mark E. Manyin dan Mary Beth Nikitin, *Foreign Assistance to North Korea*, (CRS Report for Congress, 2014), h. 1, diakses melalui <https://fas.org/sgp/crs/row/R40095.pdf> pada tanggal 08 Maret 2017 pukul 08:50 WIB

⁹ Selig. S. Harrison, *Korean Endgame: A Strategy For Reunification And Us Disengagement*, (USA: Princeton University Press, 2002). Dikutip dari Anita Ferawati, "JURNAL: KEBIJAKAN KIM JONG IL TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR DI KOREA UTARA TAHUN 1998-2008", h. 10. Diakses melalui <https://eprints.uns.ac.id/11149/1/592-1554-2-PB.pdf> pada tanggal 08 Maret 2017 pukul 10:51 WIB

membalik, justru membuat Korea Utara semakin terpuruk. Karena 15% anggaran negara yang dimiliki Korea Utara digunakan untuk mengembangkan fasilitas militer. Sehingga militer yang dimiliki Korea Utara sangatlah baik dan telah diakui di dunia internasional. Korea Utara masuk dalam 4 besar negara yang memiliki sistem pertahanan terbaik dunia. Namun kekuatan militer yang baik yang dimiliki Korea Utara belum mampu untuk memperbaiki ekonominya.¹⁰

4.2.1 Pengembangan Nuklir Korea Utara

Perkembangan teknologi nuklir yang dimiliki Korea Utara berawal sejak berakhirnya Perang Korea (1950-1953).¹¹ Pada awalnya Korea Utara membiayai tambang uranium yang memanfaatkan empat juta ton bijih uranium yang berkualitas tinggi. Bijih uranium tersebut dapat diekstrak lebih banyak dari jumlah yang dihasilkan. Melimpahnya potensi sumber daya alam yang dimiliki dan kebutuhan energi Korea Utara, maka mendorong Korea Utara untuk mencoba mengembangkan program nuklir.¹² Motif Korea Utara dalam pengembangan nuklir karena dilandasi oleh beberapa sebab, yaitu :¹³

¹⁰ Shafira, "Kepemimpinan Diktator Korea Utara", 2004, diakses melalui http://pshafira-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-99638-MBP%20Asia%20TimurKepemimpinan%20Diktator%20di%20Korea%20Utara.html pada tanggal 08 Maret 2017 pukul 12:13 WIB

¹¹ Robert Powell. *Nuclear Deterrence Theory: The Search for Credibility*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), h. 12

¹² Daniel A. Pinkston, *The North Korean Ballistic Missile Program*, (Washington: Strategic Studies Institute, 2008), h. 15

¹³ Muhammad Nabil, "DIPLOMASI MULTILATERAL SIX PARTY TALKS DALAM PROSES DENUKLIRISASI KOREA UTARA PERIODE 2003-2009", kearsipan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, h.20

- 1) Terinspirasi oleh gagasan *Juche* dan *Songun* dimana militer memiliki prioritas khusus. Salah satu prioritas tersebut diantaranya bahwa senjata merupakan garis hidup negara dan sumber kemenangan revolusi.
- 2) Adanya ancaman serangan militer dan bom atom dari negara lain.
- 3) Mempertahankan warisan penting para leluhur berupa partai dan rakyat yang tidak terkalahkan serta terciptanya tentara revolusioner yang kuat.

Program nuklir Korea Utara dibangun atas bantuan Uni Soviet. Kedua negara menandatangani sebuah perjanjian kerjasama nuklir pada 1959. Uni Soviet memberikan bantuan selama berlangsungnya Perang Dingin. Dalam perjanjian tersebut, memungkinkan dilakukan berbagai pertukaran proyek, teknis dan ilmiah. Termasuk pembangunan Pusat Penelitian Nuklir Yongbyon, pelatihan teknisi Korea Utara, dan peninjauan teknis untuk penggunaan nuklir.¹⁴

Para ahli nuklir Soviet terlibat langsung dalam membantu pembangunan sebuah fasilitas situs nuklir bawah tanah untuk menyimpan pembuangan radio aktif dari hasil isotop.¹⁵ Pada perjanjian antara Uni Soviet dan Korea pada Utara tahun 1959, Uni Soviet telah melatih lebih dari 300 insinyur dan fisikawan Korea Utara di lembaga Soviet. Termasuk Institut Bersama Penelitian Nuklir di Dubna dan Sekolah Tinggi Teknik Bauman. Sementara itu, berdasarkan survey geologi yang dilakukan Uni Soviet, bahwa Korea Utara memiliki banyak simpanan bijih uranium dan grafit yang kemudian

¹⁴ Michael J. Mazaar, *North Korea and the Bomb: A Case Study in Nonproliferation*, (London: Macmillan Press, 1955), h. 21

¹⁵ Steven Aftergood and Hans M. Kristensen, "Nuclear Weapons Program", diakses melalui <https://fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/> pada tanggal 08 Maret 2017 pukul 13.15 WIB

dikembangkan Pyongyang untuk membentuk blok bangunan program pembuatan plutonium.¹⁶

Pada tahun 1970an Korea Utara mampu mencapai teknologi nuklir terancangannya, terutama di bidang penyulingan, konversi, dan produksi. Teknisi-teknisi Korea Utara dapat menghasilkan reaktor nuklir yang menjadi inti dari program nuklir Korea Utara.¹⁷ Keberhasilan ini yang membuat Korea Utara terus menerus membuat reaktor nuklirnya terancang. Setelah Korea Utara mampu menghasilkan nuklirnya, membuat Korea Utara ingin melakukan uji coba nuklir. Beberapa Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir.

Keberhasilan yang telah dicapai Korea Utara dalam mengembangkan nuklir, akhirnya diketahui dunia internasional. Pada akhirnya di tahun 1977 Korea Utara menandatangani sebuah perjanjian dengan Badan Energi dan Atom Internasional (IAEA) dimana dalam perjanjian tersebut mengizinkan IAEA melakukan pemeriksaan terhadap reaktor riset yang telah dibangun Korea Utara atas bantuan Uni Soviet tersebut.¹⁸

Pada 12 Desember 1985 Korea Utara mengabdikan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT). NPT merupakan suatu perjanjian yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Setelah masuknya Korea Utara ke dalam NPT, maka mewajibkan Korea Utara

¹⁶ Hancheon-ro dan Gangbuk-gu, *Understanding North Korea*, (Seoul: Institute for Unification Education, Ministry of Unification, 2012), h. 132

¹⁷ Michael J. Mazaar, *Op. Cit.*, h. 23

¹⁸ Koen De Ceuster dan Jan Melissen, *Ending The North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspective*, (Den Hag: Desiree Davidse, 2008), h. 9

untuk melakukan proses denuklirisasi, yaitu proses terwujudnya penghapusan kepemilikan senjata nuklir.¹⁹

Tergabungnya Korea Utara dalam perjanjian NPT, belum juga membuka peluang untuk terciptanya hubungan diplomatik yang baik antara Korea Utara dan dunia internasional pada dekade berikutnya. Korea Utara selalu menjelaskan bahwa situs yang selama ini dicurigai oleh IAEA merupakan sebuah fasilitas militer non-nuklir diluar jangkauan pemeriksaan IAEA. Karena desakan dari IAEA yang terus menerus dilakukan terhadap Korea Utara, maka Pyongyang menanggapi desakan IAEA tersebut dengan mengajukan pengunduran diri dari Perjanjian NPT pada Maret 1993.²⁰

Pada tahun 1993-1994 Korea Utara mengalami krisis nuklir akibat penolakan yang dilakukan Korea Utara untuk bekerjasama dengan IAEA serta laporan jumlah produksi plutonium Korea Utara hingga pada mundurnya Korea Utara dari NPT tahun 1993.²¹ Pada tanggal 11 Mei 1993, PBB menghimbau Korea Utara agar dapat bekerjasama dengan IAEA dan mengimplementasikan persetujuan denuklirisasi. PBB juga berharap agar semua pihak dapat mendorong Korea Utara agar menanggapi himbauan yang dibuat PBB. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri krisis nuklir Korea Utara.²²

Himbauan yang telah dibuat PBB membuat Amerika Serikat mengambil langkah yang cepat, mencoba meredakan krisis nuklir yang terjadi di Korea Utara. Pada tahun

¹⁹ Kelsey Davenport, "Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy", diakses melalui <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron#1985> pada tanggal 08 Maret 2017 pukul 16:40 WIB

²⁰ Ibid

²¹ Michael J. Mazaar, *Op. Cit.*, h. 102

²² Koen De Ceuster and Jan Melissen, *Op. Cit.*, h. 10

1993 Amerika Serikat mencoba melakukan pembicaraan politik dengan Korea Utara. Pembicaraan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara melahirkan rumusan “*Agreed Framework*” yang menjadi prinsip dasar untuk melanjutkan dialog Amerika Serikat dan Korea Utara.²³ Akibat dari perbincangan tersebut, Korea Utara menunda pengunduran dirinya dari NPT.²⁴ Dalam *Agreed Framework* juga dibahas mengenai perbaikan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Utara dalam bidang politik serta ekonomi.

Seiring berjalannya waktu krisis nuklir yang dihadapi Korea Utara mengalami pengurangan. Nuklir Korea Utara telah mengalami kebangkitan. Namun, keberhasilan yang telah dicapai Korea utara ini membuat Korea Utara tidak menepati janjinya bahwa pihaknya akan menerima pemeriksaan oleh IAEA. Korea Utara selalu menolak pemeriksaan fasilitas nuklir yang tidak dilaporkan kepada IAEA. Pyongyang juga menolak untuk bergabung dalam Perjanjian Larangan Uji Komprehensif dan menolak berpartisipasi dalam konferensi tahunan PBB mengenai perlucutan senjata nuklir pada 25 Februari 1997.²⁵

Usaha yang telah dilakukan Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan Korea Utara yang menghasilkan *Agreed Framework* ternyata tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sikap saling percaya antar kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Korea Utara mulai melangkah lebih jauh dengan mengembangkan kembali senjata nuklirnya.

²³ Lihat Lampiran I, h. 88

²⁴ Larry A. Niksch, “*North Korea’s Nuclear Weapons Program*”, CRS Issue Brief for Congress, 2006, h. 6

²⁵ Hancheon-ro dan Gangbuk-gu, *Op. Cit.*, h. 133

Setelah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat mengalami kegagalan, Amerika Serikat terus menerus berusaha agar dapat membawa Korea Utara ikut serta dalam perundingan. Upaya baru dilakukan dengan membentuk pembicaraan multilateral pada tahun 2003 antara Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara, upaya tersebut dikenal dengan “*Six Party Talks*”.²⁶ *Six Party Talks* ini bertujuan untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara dan membongkar program nuklirnya melalui proses negosiasi. Pembicaraan dibangun sebagai respon terhadap pengunduran diri Korea Utara dari Perjanjian NPT.²⁷

Beberapa anggota *Six Party Talks* melakukan pertemuan, ada berbagai masalah dan kendala yang dihadapi anggota *Six Party Talks*. Pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali juga mendapat titik terang. Korea Utara bersikeras mempertahankan nuklir yang dimilikinya. Usaha Amerika Serikat akan memberikan bantuan sumber energi kepada Korea Utara berharap Korea Utara dapat menstujui upaya penghapusan nuklir Korea Utara. Usaha tersebut sedikit mendapat titik terang. Namun, saat suasana mulai membaik bagi para anggota *Six Party Talks* karena usaha dapat dinyatakan berhasil, Korea Utara tiba-tiba membantalkan perjanjian tersebut. Hal ini membuat para anggota *Six Party Talks* melakukan kembali pertemuannya.

Setelah melakukan beberapa pertemuan dan melakukan perjanjian-perjanjian yang dilakukan para anggota *Six Party Talks* akhirnya mendapatkan poin utama tercapainya tujuan tersebut. Korea Utara berkomitmen untuk meninggalkan semua

²⁶ Lihat Lampiran II, h. 83

²⁷ Wade L. Huntley, John Greshman (ed), “The Six-Party Talks Agreement, Next steps in the negotiations with North Korea”, 2005, diakses melalui http://fpif.org/the_six-party_talks_agreement/ pada tanggal 09 Maret 2017 pukul 01:23 WIB

senjata nuklir dan program nuklir yang ada. Namun, Korea Utara mempunyai syarat yakni meminta disediakan reaktor air ringan untuk penggantian program nuklir yang akan dibongkarnya. Mendengar syarat kompensasi yang diajukan oleh Korea Utara, memicu perdebatan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Korea Utara bersikeras menganggap bahwa pernyataannya untuk meminta disediakan reaktor air ringan untuk memiliki program energi nuklir yang damai. Namun, Amerika Serikat menganggap bahwa Korea Utara seharusnya tidak menerima reaktor nuklir.

Korea Utara menegaskan bahwa negaranya memiliki hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai. Kemudian pihak-pihak lain menyatakan rasa hormat mereka dan setuju untuk membahas pada waktu yang tepat, mengenai penyediaan reaktor air ringan untuk Korea Utara. Akhirnya permohonan yang diajukan oleh Korea Utara disetujui dan Korea Utara akan menghentikan nuklirnya. Pembongkaran program nuklir yang dimiliki Korea Utara belum dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Isu pembongkaran program nuklir Korea Utara tersebut hanya sampai pada titik kesepakatan. Korea Utara sempat menutup fasilitas nuklirnya pada Juni 2007 sebagaimana yang dilaporkan IAEA, namun penutupan yang dilkakukan Korea Utara tersebut hanya sementara. Namun kenyataannya Korea Utara kembali menghidupkan dan melanjutkan program nuklirnya. Untuk itu, tujuan utama *Six Party Talks* untuk melakukan denuklirisasi di Korea Utara masih belum berhasil untuk diwujudkan.

Para negara anggota *Six Party Talks* memberikan bantuan kepada Korea Utara dalam bentuk kerjasama di bidang energi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya, dimana dengan menghentikan

program nuklirnya tersebut, maka Korea Utara akan mendapatkan keuntungan berupa bantuan energi dan peningkatan ekonomi. Walaupun sebenarnya usaha ini tidak memiliki efek signifikan, para negara anggota *Six Party Talks* telah berusaha membangun kembali pembicaraan antar pihak yang bertikai dengan semangat kebersamaan.

Ideologi yang telah dianut oleh Korea Utara membawa Korea Utara berpegang teguh terhadap tujuannya untuk mempertahankan negaranya atas dasar kemandirian. Korea Utara tidak akan mungkin meninggalkan program nuklirnya, karena program nuklir yang dimiliki Korea Utara menjadi salah satu bukti kemandirian yang dimiliki Korea Utara dalam melaksanakan revolusi dan pembangunan yang tidak ingin bergantung kepada negara lain. Rakyat maupun pemerintah bersama-sama membangun untuk memajukan negara tersebut. Walaupun berbagai bantuan energi dan ekonomi telah diberikan oleh negara anggota *Six Party Talks* bagi Korea Utara sebagai kompensasi atas pembongkaran program nuklirnya, akan tetapi Korea Utara sadar bahwa negaranya tidak boleh terus menerus bergantung kepada bantuan negara lain.

4.2.2 Isu Kelaparan Korea Utara

Pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara membuat berbagai kecaman dan embargo dari dunia internasional yang membuat negara ini berada di garis kemiskinan yang parah. Memperkuat pertahanan militer dan melakukan industrialisasi ternyata masih belum cukup untuk bisa membuat Korea Utara jauh dari kemiskinan. Justru, usaha-usaha yang telah dilakukan tersebut membuat Korea Utara menjadi negara

miskin. Khusus meningkatnya angka kelaparan yang ada di Korea Utara menjadi bukti bahwa negara ini merupakan negara yang sangat miskin.

Kelaparan merupakan sebuah pelanggaran terhadap martabat manusia yang bisa menghambat progres ekonomi, politik dan sosial. Hal ini dapat mencegah manusia untuk mengembangkan skillnya, menggunakan manfaat teknologi terbaru dan kehilangan kesempatan pembangunan lainnya. Isu kelaparan yang terjadi di Korea Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Khusus kelaparan ini pada awalnya terjadi akibatnya kurangnya ketersediaan pangan yang sudah dirasakan pada tahun 1950.

Isu kelaparan di Korea Utara terparah terjadi pada tahun 1990. Bencana kelaparan pada pertengahan tahun 1990 ini menyebabkan sekitar 600 ribu sampai 3 juta rakyatnya mati kelaparan atau kira-kira 5% sampai 10% karena tidak cukupnya persediaan pangan yang tersedia dan bisa mereka dapatkan.²⁸ Kelaparan ini terjadi akibat dari krisis ekonomi yang berdampak pada kurangnya bahan-bahan ketersediaan produksi. Ketidaktersediaan keperluan produksi mengakibatkan terganggunya kegiatan pertanian sehingga pasokan pangan masyarakat tidak dapat terpenuhi. Selain dari kurangnya ketersediaan produksi, terjadinya bencana alam yang parah membuat lahan pertanian tidak bisa digunakan dengan maksimal.

Kelaparan terparah juga terjadi di tahun 1994, akibat dari bencana banjir yang terjadi sehingga persediaan pangan berkurang dan pemerintah sulit untuk memenuhi

²⁸ Mark E. Manyin dan Mary Beth Nikitin, *Loc. Cit.*,

kebutuhan pangan rakyat.²⁹ Pada tahun 1997 terjadi bencana EL Nino yang melanda wilayah Asia Timur dan Timur Tengah. Korea Utara mengalami dampak paling besar, infrastruktur seperti jalan dan jembatan mengakibatkan sulitnya mobilisasi barang kebutuhan untuk pertanian, selain itu, kerusakan parah pada lahan pertanian mengakibatkan para petani kesulitan dalam membangkitkan kegiatan pertanian. kondisi semakin memperburuk kondisi Korea Utara. Pada tahun 1995-2000 tercatat 600 ribu hingga 1.000.000 rakyat Korea Utara meninggal akibat kelaparan yang terjadi.³⁰

Pemerintah belum dapat mencegah permasalahan yang dialami negaranya. Penderitaan masyarakat Korea Utara paling jelas dirasakan oleh para kaum wanita dan anak-anak karena mereka tidak memiliki keahlian yang bisa digunakan sehingga mereka hanya bisa hidup berkegantungan. Akibat kurangnya kebutuhan pangan banyak kaum wanita yang rela tidak makan dan membiarkan anak-anak mereka yang dapat makan supaya anak-anak mereka dapat bertahan hidup. Bahkan banyak kaum wanita yang memberikan rumput liar kepada anaknya karena tidak ada lagi makanan yang dapat dimakan. Para ibu hamil banyak yang mengalami kekurangan gizi dan berakhir pada kematian dan juga banyak ditemukan khusus kematian bagi anak-anak karena mereka kekurangan nutrisi.³¹

Badan organisasi internasional seperti, *Internastional Food Agriculture Organization* (FAO), *World Food Programme* (WFP) dan *European Union* (EU) pada tahun 1998 menemukan bahwa sekitar 60% anak-anak di Korea Utara mempunyai tubuh yang kecil tidak seperti ukuran normal anak-anak lainnya dan sekitar 50% masyarakat

²⁹ Ibid, h. 7

³⁰ Meredith Woo-Cumings, *The Political Ecology of Famine: The North Korea Catastrophe and Its Lessons*, (ADB Institute Research Paper, 2002), h. 27-29

³¹ Sue Lautz, *The Famine in North Korea: Humanitarian Response in Communist Nations*, (Feinstein International Famine Center: Tufts University, 1997), h. 10

Korea Utara menderita malnutrisi.³² Kelaparan inilah yang menyebabkan masyarakat Korea Utara mengalami penderitaan seperti ini, mereka memakan apapun yang menurut mereka dapat dimakan tanpa memperhatikan kandungan nutrisi yang ada.

Para wanita Korea Utara rela melakukan apapun demi mendapatkan asupan makanan, bahkan mereka rela menjual diri demi kebutuhan mereka dapat tercukupi. Anak-anak Korea Utara banyak pula yang terlantar, anak-anak terlantar ini biasanya dijadikan sasaran pembunuhan yang kemudian dimakan. Memakan daging manusia adalah hal yang lazim yang bisa ditemui di Korea Utara karena masyarakat Korea Utara akan melakukan apapun agar perlu mereka dapat terisi dan dapat melanjutkan hidup.³³

Pemerintah Korea Utara mencoba mengambil langkah untuk mengatasi masalah kelaparan ini dengan cara *Public Distribution Sistem* (PDS) atau sistem pembagian jatah makanan kepada rakyat. Pembagian ini dilakukan pemerintah dengan memberikan kebutuhan berdasarkan pertimbangan status sosial dan umur. Hal ini membuat sistem yang telah dibuat pemerintah dianggap tidak dapat mengurangi masalah yang terjadi. Bahkan, kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan jatah makanannya.³⁴

³² Rhoda E. Howard-Hassmann, "*State-Induced Famine and Penal Starvation in North Korea*", (Canada Research Chair in International Human Rights, Department of Global Studies and Balsillie School of International Affairs, Wilfrid Laurier University, 2011), h. 10

³³ Ibid, h. 8

³⁴ "*Famine and Life On The Margins: Food Insecurity and Famine*", Contemporary Case Studies, Part 3, h. 38, diakses melalui <https://www.hoddereducation.co.uk/getattachment/11727e99-4a08-4569-97c9-f0dd39740691/Food-Famine.pdf.aspx> pada tanggal 11 Maret 2017 pukul 13:01 WIB

Table 4.2 : Jatah Beras dan Jagung Perkapita Perhari

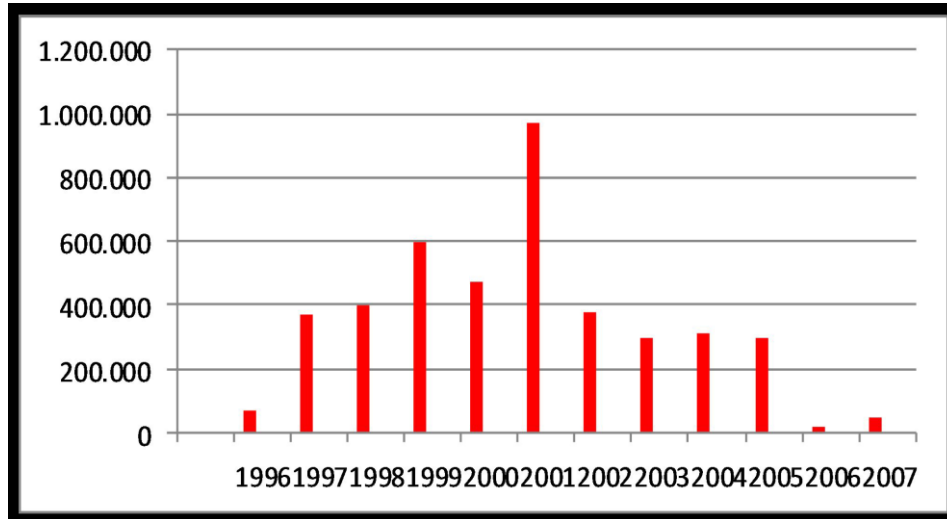
No.	Pengelompokan Berdasarkan Pekerjaan dan Umur	Jatah Per Kapita Perhari (gram)	Jatah Beras dan Jagung	
			Pyongyang	Area Lainnya
1.	Pegawai Pemerintah tingkat tinggi	700	10:0	10:0
2.	Tenaga Kerja Tetap	600	6:4	3:7
3.	Tenaga Kerja Berat	800	6:4	3:7
4.	Pekerja Kantoran	600	6:4	3:7
5.	Keamanan Khusus	800	7:3	3:7
6.	Militer	700	6:4	3:7
7.	Mahasiswa	600	6:4	3:7
8.	Siswa Sekolah Menengah	500	6:4	3:7
9.	Siswa Sekolah Tingkat Pertama	400	6:4	3:7
10.	Anak-anak pra-Sekolah	300	6:4	3:7
11.	Anak-anak umur dibawah 3 tahun	100-200	6:4	3:7
12.	Orang Tua dan Penyandang cacat	300	6:4	3:7

Sumber : Ministry of National Unification. Dikutip dari Nirmala, "Peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kelaparan Korea Utara tahun 2006-2012", kearsipan Universitas Andalas, 2006, h. 5

Masalah kelaparan di Korea Utara ini membuat dunia internasional berkeinginan untuk membantu. Pemberian bantuan kemanusiaan datang ke Korea Utara diantaranya bantuan dari beberapa Organisasi Internasional dan beberapa negara anggota *Six Party Talks*. PBB memberikan bantuan sekitar 930 juta US\$, NGO sekitar 145,55 juta US\$, Uni Eropa sekitar 189,2 juta US\$, Amerika Serikat 550 juta US\$, Jepang 255 juta US\$, China 215,6 juta US\$, Korea Selatan 450 juta US\$.³⁵ Pemberian bantuan melalui PBB diberikan paling banyak oleh WFP yang merupakan organisasi dibawah PBB yang bergerak pada bantuan pangan negara-negara yang mengalami kelaparan.

³⁵ Mark E. Manyin dan Mary Beth Nikitin, *Op. Cit.*, h. 13

Grafik 4.1 : Bantuan Pangan WFP ke Korea Utara



Sumber : Google

Bantuan yang diberikan WFP kepada Korea Utara dilakukan secara berkelanjutan. Walaupun bantuan ini mengalami pasang surut, ini semua disebabkan karena aksi uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara, sehingga menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan internasional. Banyak negara-negara yang mengurangi pemberian bantuan kemanusiaan pada Korea Utara yang disalurkan melalui WFP. Akibatnya masyarakat Korea Utara kembali menderita akibat kelaparan.

Pada awalnya, Korea Utara menolak bantuan asing karena hal ini dianggap melanggar dan bertentangan dengan ideologi *Juche* yang telah mereka anut. Kemandirian yang telah tertanam dalam diri setiap orang yang ada di Korea Utara, menyebabkan keterpurukan terus menerus. Kesengsaraan masyarakat Korea Utara akan terus mereka rasakan jika sikap ketertutupan terus diterapkan. Para pemimpin Korea Utara dapat hidup dalam kesejahteraan namun rakyat kecil di Korea Utara akan

sengsara seumur hidup mereka. Masa depan mereka hancur akibat keegoisan para pemimpinnya.